



# DISTRIBUSI PENDAPATAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017

## **DISTRIBUSI PENDAPATAN KOTA PALANGKA RAYA 2017**

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm  
Jumlah Halaman : iv + 22 halaman

# KATA PENGANTAR

Buku Distribusi Pendapatan Penduduk Kota Palangka Raya Tahun 2017 ini merupakan publikasi yang diterbitkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya. Buku ini diterbitkan sebagai respon terhadap permintaan data baik untuk kepentingan pemerintah maupun masyarakat pengguna data.

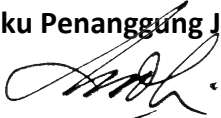
Penyajian publikasi ini memuat data dan informasi untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan penduduk Kota Palangka Raya beserta analisisnya seperti penentuan tingkat ketimpangan pendapatan berdasarkan kriteria Bank Dunia dan Koefisien Rasio Gini (Metode Oshima) keadaan tahun 2017. Diharapkan buku ini dapat memberikan informasi sebagai acuan dalam rangka perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan di Kota Palangka Raya.

Meskipun publikasi ini telah diupayakan kelengkapan dan penyempurnaan data yang disajikan, namun masih belum dapat memenuhi kebutuhan pemakai data secara maksimal. Untuk perbaikan publikasi ini tanggapan dan saran-saran dari pemakai sangat diharapkan.

Semoga penyajian data statistik ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam rangka menyusun dan melaksanakan pembangunan yang kita cita-citakan.

Palangka Raya, Desember 2018

**Kepala Bappeda Kota Palangka Raya  
Selaku Penanggung Jawab**



**H. AKHMAD FORDIANSYAH, S.H., M.A.P**  
**NIP. 19641121 198503 1 008**

**Kepala BPS Kota Palangka Raya  
Selaku Ketua Tim Penyusun**



**AGIE, SH, M.Hum**  
**NIP. 19631011 198403 1 002**

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.Latar Belakang	1
2.Tujuan Penghitungan Rasio Gini dan Distribusi Pendapatan	4
3.Sumber Data	4
4.Metodologi Pengukuran Tingkat Pemerataan	5
4.1 Kriteria Bank Dunia	5
4.2 Kurva Lorenz	6
4.3 Rasio Gini	7
II. GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN	8
III. ANALISIS RASIO GINI DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN	10
1.Rasio Gini	10
2.Distribusi Pendapatan Penduduk	15
3.Kurva Lorenz	16
IV. PENUTUP	18
Lampiran	20

Tabel 1.	Rasio Gini Kota Palangka Raya, 2015-2017	20
Tabel 2.	Distribusi Pendapatan Kota Palangka Raya Menurut Kriteria Bank Dunia, 2015-2017	20
Tabel 3.	Rasio Gini Kota Palangka Raya Menurut Tipe Daerah, 2017	20
Tabel 4.	Rasio Gini Penduduk 10 tahun Ke atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Kota Palangka Raya 2017	21
Tabel 5.	Rasio Gini Penduduk 10 tahun Ke atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Kota Palangka Raya 2017	22
Tabel 6.	Rasio Gini Penduduk 10 tahun Ke atas Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan, Kota Palangka Raya 2017	22

# DAFTAR TABEL

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kurva Lorenz	6
Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Palangka Raya 2012-2017 (persen)	8
Gambar 2.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 (persen)	9
Gambar 3.1 Perkembangan Rasio Gini Kota Palangka Raya 2013-2017 (persen)	10
Gambar 3.2 Rasio Gini Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2017	11
Gambar 3.3 Kecenderungan Rasio Gini Menurut Wilayah di Kota Palangka Raya, 2016-2017	13
Gambar 3.4 Distribusi Pendapatan Kota Palangka Raya Menurut Kriteria Bank Dunia, 2017	16
Gambar 3.5 Kurva Lorenz Kota Palangka Raya, 2016-2017	17

# I. PENDAHULUAN

## 1. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Oleh karenanya strategi pembangunan ekonomi suatu daerah pada umumnya diarahkan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk mengukur pertumbuhan ekonomi umumnya menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. PDRB ini merupakan gambaran dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor-sektor produksi pada suatu daerah dalam kurun waktu satu tahun. Pertumbuhan ekonomi mensyaratkan PDRB yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan suatu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan pada suatu daerah.

Sejalan dengan salah satu tujuan pembangunan ekonomi yaitu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat disertai pendistribusian pendapatan yang adil dan merata, maka yang menjadi tujuan dasar pembangunan ekonomi tidak hanya untuk mengejar pertumbuhan ekonomi, namun juga untuk menciptakan pemerataan pendapatan antar lapisan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu memberikan manfaat yang berarti bagi anggota masyarakat yang paling miskin dan paling membutuhkan perbaikan taraf hidup. Dengan kata lain pembangunan akan dikatakan berhasil apabila pertumbuhan ekonomi yang tinggi disertai dengan pendistribusian pendapatan (*income distribution*) yang merata pada seluruh lapisan masyarakat.

Fenomena ketimpangan distribusi pendapatan masih merupakan persoalan kompleks yang dihadapi oleh negara-negara miskin dan berkembang di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dalam skala yang lebih kecil, persoalan ini juga dihadapi oleh daerah-daerah di Indonesia hingga ke tingkat kabupaten/kota.

Seperti halnya dalam pembangunan ekonomi nasional, pembangunan ekonomi daerah juga bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar untuk meningkatkan kinerja perekonomian daerah serta memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat. Strategi pembangunan yang dilaksanakan di daerah harus mengacu pada karakteristik yang dimiliki daerah dengan mendayagunakan potensi sumber daya manusia, sumber-sumber fisik serta kelembagaan lokal. Peran pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan pembangunan memiliki arti penting dalam menentukan keberhasilan tujuan pembangunan ekonomi.

Kota Palangka Raya yang sedang membangun dalam kerangka otonomi daerah, juga memikul tanggung jawab besar bagaimana mewujudkan perekonomian yang baik, tidak hanya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun juga harus mampu mewujudkan distribusi pendapatan yang merata di antara golongan masyarakat .

Untuk dapat menyusun perencanaan pembangunan yang kokoh, yang bermuara pada kepentingan rakyat pada umumnya, dan khususnya pada peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah memerlukan dukungan ketersediaan data dan informasi yang lengkap, akurat, dan *up to date*. Salah satu data yang sangat penting dan berguna dalam rangka perencanaan pembangunan tersebut adalah Rasio Gini (*Koefisien Gini*) yang menggambarkan tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk dan Distribusi Pendapatan menurut kriteria Bank Dunia (*World Bank Criteria*).

Setiap wilayah baik negara, provinsi maupun kabupaten/kota yang melakukan pembangunan pada akhirnya akan menuju pada peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menjadi lebih berarti jika diikuti pemerataan atas hasil-hasil pembangunan. Berbagai kebijakan ekonomi untuk peningkatan produksi akan lebih berarti jika manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Oleh karena itu orientasi pemerataan hasil-hasil



pembangunan seharusnya menjadi muara dari seluruh kegiatan perekonomian suatu daerah.

Salah satu keluhan pembangunan yang sering dibicarakan bahkan dirasakan sampai lapis bawah adalah hasil-hasil pembangunan tidak bisa dinikmati secara merata, antara desa dan kota, antar daerah, antar sektor dan antar golongan pendapatan. Hal inilah yang biasa disebut ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, dan lebih lanjut kalau tidak dicegah secara cermat akan mengarah kepada keangkuhan dan menimbulkan kecemburuan sosial.

Dengan memperhatikan perkembangan sosial ekonomi yang terjadi selama ini, banyak ahli ekonomi berpendapat bahwa penanggulangan ketimpangan pendapatan ini tidak saja penting dan perlu ditinjau dari sudut pertimbangan moral, tetapi mendesak pula untuk ditinjau dari ancaman ketegangan sosial atau kecemburuan sosial yang terselubung di dalamnya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi seringkali dibarengi kenaikan atau membesarnya tingkat ketimpangan pendapatan (semakin tidak merata). Pertumbuhan ekonomi yang pesat bukan saja membawa ketimpangan pendapatan yang tinggi tetapi juga menimbulkan kemiskinan pada sebagian penduduk.

Hal yang patut dipertanyakan "seberapa jauh jarak antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah berdasarkan wilayah pembangunan di Kota Palangka Raya?", oleh karena itu, informasi terkait tentunya yang dapat menunjang perencanaan pembangunan. Ada banyak indikator yang dapat mengukur kesenjangan ini, tetapi indikator yang sering digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan adalah Rasio Gini (*Gini Ratio*) dan Distribusi Pendapatan menurut Kriteria Bank Dunia. Melalui penyusunan publikasi ini gambaran mengenai kesenjangan dan distribusi pendapatan penduduk Kota Palangka Raya dapat dijadikan sebagai tolak ukur dan bahan evaluasi pembangunan yang telah dan sedang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama ini.

## **2. Tujuan Penghitungan Rasio Gini dan Distribusi Pendapatan**

Penghitungan Rasio Gini dan Distribusi Pendapatan (menurut kriteria Bank Dunia) penduduk Kota Palangka Raya bertujuan untuk mendapatkan data/informasi tentang besarnya ketimpangan pendapatan masyarakat dan tingkat pemerataannya pada tahun 2017. Untuk memperoleh informasi yang lebih detail, dihitung pula Rasio Gini penduduk berumur 10 tahun ke atas yang bekerja menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan, jenis lapangan usaha utama dan status pekerjaan pada lapangan usaha utama. Informasi ini sangat dibutuhkan untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat pemerataan pendapatan pada masing-masing sektor ekonomi dan tingkatan pendidikan terutama pada penduduk usia 10 tahun ke atas yang bekerja.

## **3. Sumber Data**

Sumber data utama yang digunakan dalam penghitungan Rasio Gini dan Distribusi Pendapatan Penduduk Kota Palangka Raya tahun 2017 adalah jumlah penduduk dan rata-rata pendapatan per kapita yang sudah dikelompokkan menurut kelasnya. Data ini diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). SUSENAS secara rinci mengumpulkan data dan informasi tentang keadaan rumah tangga dan anggota rumah tangga (individu) dan pengeluaran makanan dan non makanan rumah tangga.

Dalam penghitungan Rasio Gini dan distribusi pendapatan, idealnya adalah menggunakan data pendapatan. Namun karena sulitnya mendapatkan informasi pendapatan yang lengkap dari responden, menyebabkan data pengeluaran lebih banyak dipakai. Data pengeluaran dipakai sebagai proksi untuk memperoleh data pendapatan, meskipun data pengeluaran masih mengandung beberapa keterbatasan, antara lain kurang terekamnya pengeluaran konsumsi di luar rumah dan kurang mencakup kelompok lapisan atas. Namun data pengeluaran yang dikumpulkan ini

masih relatif lebih mendekati keadaan sebenarnya dibandingkan dengan data pendapatan.

Penggunaan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan sering menimbulkan perdebatan. Permasalahan yang sering timbul adalah :

- a. kebiasaan seseorang/rumah tangga yang selalu memenuhi kebutuhan konsumsinya dengan sistem utang sehingga pengeluaran konsumsi rumah tangga tidak mencerminkan pendapatan rumah tangga yang sesungguhnya,
- b. pada suatu level tertentu konsumsi seseorang/rumah tangga kemungkinan tidak banyak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga apabila data ini digunakan untuk membandingkan tingkat perubahan pemerataan pendapatan dari waktu ke waktu hampir tidak berubah.

Namun demikian bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, data Susenas ini dirasakan adalah yang paling mendekati kondisi sosial ekonomi masyarakat.

#### **4. Metodologi Pengukuran Tingkat Pemerataan**

Dari berbagai studi yang dilakukan oleh para ahli mengenai pemerataan pendapatan penduduk, terdapat beberapa metode untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan. Mulai dari metode statistik yang sederhana (seperti range, standar deviasi, indeks bowley, koefisien variasi, dan lain sebagainya) sampai pada metode empiris (seperti indeks Theil, indeks Oshima, indeks Kuznet, kurva Lorenz dan lain-lain). Di antara metode-metode tersebut di atas, terdapat dua metode yang populer digunakan baik di Indonesia maupun di beberapa negara, yaitu ukuran kriteria Bank Dunia dan Rasio Gini.

##### **4.1 Kriteria Bank Dunia**

Ukuran ketimpangan pendapatan dengan menggunakan kriteria Bank Dunia cukup sederhana dan mudah penghitungannya, yaitu berdasarkan persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan rendah terhadap

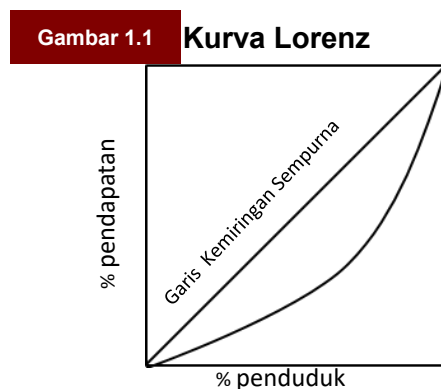
total pendapatan seluruh penduduk. Kriteria ketimpangan menurut Bank Dunia adalah sebagai berikut:

- a. Bila 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah menerima kurang dari 12 persen dari pendapatan total, maka ketimpangan pendapatan yang terjadi di suatu daerah adalah **tinggi**.
- b. Bila 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah menerima 12 - 17 persen dari pendapatan total, maka ketimpangan pendapatan yang terjadi di suatu daerah adalah **sedang**.
- c. Bila 40 persen penduduk dengan pendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen dari pendapatan total, maka ketimpangan pendapatan yang terjadi di suatu daerah adalah **rendah**.

Kriteria Bank Dunia tersebut dihitung berdasarkan rumus statistik, yaitu perhitungan “desil”.

## 4.2 Kurva Lorenz

Kurva Lorenz memperlihatkan hubungan kuantitatif antara persentase penerimaan pendapatan penduduk dengan persentase pendapatan yang benar-benar diperoleh selama kurun waktu tertentu.



Dari gambar di atas, sumbu horizontal menggambarkan persentase kumulatif penduduk, sedangkan sumbu vertikal menyatakan bagian dari total pendapatan yang diterima masing-masing persentase penduduk tersebut.

Sedangkan garis diagonal di tengah disebut **garis pemerataan sempurna**. Setiap titik pada garis diagonal merupakan tempat kedudukan persentase penduduk yang sama dengan persentase penerimaan pendapatan.

Semakin jauh jarak garis kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat ketidakmerataannya. Sebaliknya semakin dekat jarak kurva Lorenz dari garis diagonal, semakin tinggi tingkat pemerataan distribusi pendapatannya.

### 4.3 Rasio Gini

Formula yang digunakan untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan dari koefisien gini atau Rasio Gini adalah :

$$G = 1 - \frac{\sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})}{10.000}$$

dimana :      G = Rasio Gini  
                  P = Persentase penduduk  
                  Q = Persentase kumulatif pengeluaran

Nilai Rasio Gini berada antara 0 dan 1. Bila nilai Rasio Gini bergerak mendekati 0 (nol) berarti tingkat pemerataan bertambah baik atau tingkat ketimpangan yang terjadi rendah, dan apabila nilai Rasio Gini bergerak mendekati 1 (satu) berarti tingkat ketimpangan yang terjadi tinggi.

Ketimpangan pendapatan berdasarkan nilai Rasio Gini menurut Oshima sebagai berikut:

- Tingkat ketimpangan pendapatan dikatakan **rendah** apabila nilai Rasio Gini < 0,3
- Tingkat ketimpangan pendapatan kategori **sedang** apabila nilai Rasio Gini 0,3 – 0,5
- Tingkat ketimpangan pendapatan **tinggi** apabila nilai Rasio Gini lebih besar dari 0,5

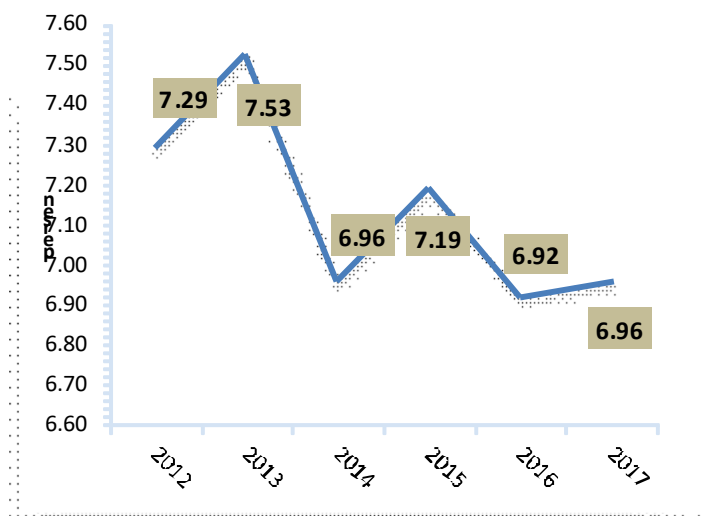
## II. GAMBARAN UMUM PEREKONOMIAN

Proses pembangunan ekonomi selalu terkait dengan berbagai hal, antara lain tentang pertumbuhan ekonomi, keseimbangan dalam struktur ekonomi, serta pemerataan distribusi pendapatan. Keterkaitan ini menyebabkan timbulnya permasalahan. Beberapa pakar ekonomi merasa khawatir bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi bisa mempertegas ketimpangan distribusi pendapatan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah gambaran makro mengenai hasil dari proses pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh seluruh *stakeholders*, baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat menuju keadaan yang lebih baik.

**Gambar 2.1**

**Pertumbuhan Ekonomi Kota Palangka Raya 2012-2017 (persen)**

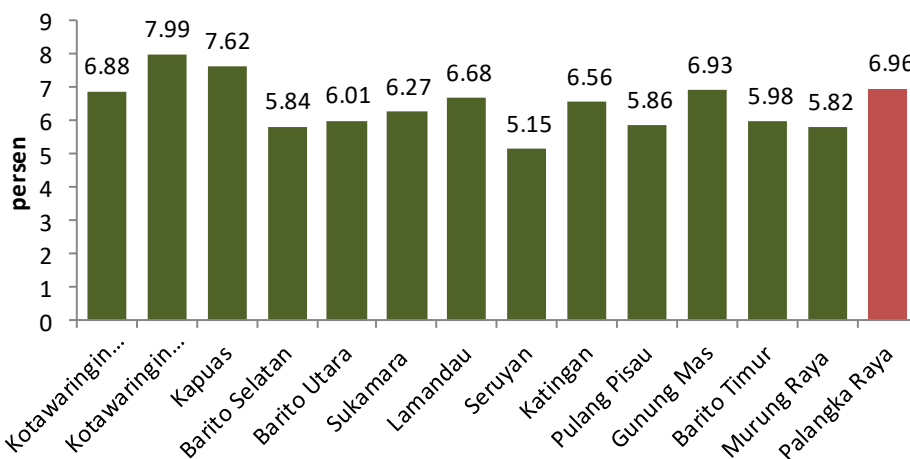


Sumber: BPS Kota Palangka Raya

Perekonomian Palangka Raya pada tahun 2017 mengalami penguatan pertumbuhan dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya (Gambar 2.1). Penguatan pertumbuhan ekonomi ini memberi petunjuk naiknya optimisme ekonomi pada Kota Palangka Raya dibandingkan dengan tahun 2016.

**Gambar 2.2**

**Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi  
di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 (persen)**



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah

Kota Palangka Raya memiliki laju pertumbuhan ekonomi terbesar ketiga di Provinsi Kalimantan Tengah. Sumber pertumbuhan yang memiliki andil besar di Kota Palangka Raya pada tahun 2017 adalah pada kategori Administrasi Pemerintahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Ini menunjukkan bahwa kontribusi ekonomi di Kota Palangka Raya didominasi dari sektor jasa termasuk administrasi pemerintahan. Selain itu, Kota Palangka Raya juga merupakan kontributor terbesar ketiga untuk Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi Kalimantan Tengah. Pada Tahun 2017, PDRB atas dasar harga berlaku di Kalimantan Tengah adalah sebesar 126,17 triliun dimana 11,57 persen dari nilai tambah tersebut merupakan kontribusi dari Kota Palangka Raya. Ini mengindikasikan bahwa Kota Palangka Raya merupakan salah satu kota yang memengaruhi kondisi perekonomian di Provinsi Kalimantan Tengah.

### III. ANALISIS RASIO GINI DAN DISTRIBUSI PENDAPATAN

Rasio Gini dan distribusi pendapatan kriteria Bank Dunia ini dihitung berdasarkan data pengeluaran yang diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2017. Data tersebut disajikan menurut berbagai karakteristik, yaitu :

- Rasio Gini menurut total penduduk
- Rasio Gini menurut daerah perkotaan dan perdesaan
- Rasio Gini menurut lapangan usaha utama
- Rasio Gini menurut status pekerjaan utama
- Rasio Gini menurut tingkat pendidikan yang ditamatkan

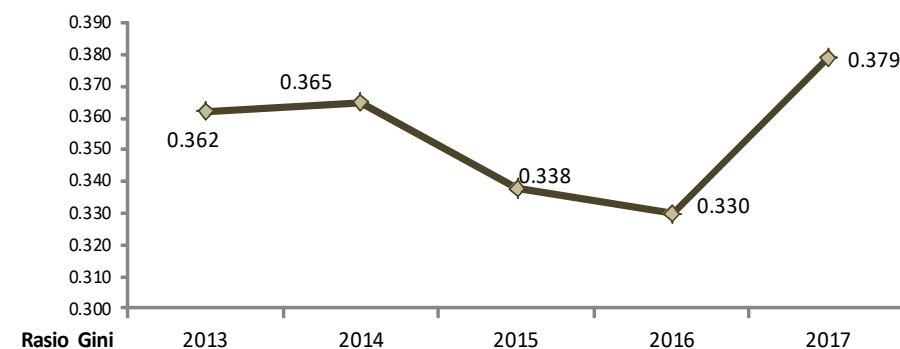
#### 1. Rasio Gini

##### 1.1. Rasio Gini Menurut Total Penduduk

Secara umum tingkat ketimpangan di Kota Palangka Raya termasuk dalam kategori sedang atau dengan kata lain pembagian pendapatan yang diterima penduduk agak kurang merata. Hal ini tergambar dari Rasio Gini Kota Palangka Raya pada tahun 2017 sebesar 0,379.

**Gambar 3.1**

**Perkembangan Rasio Gini Kota Palangka Raya  
2013-2017 (persen)**



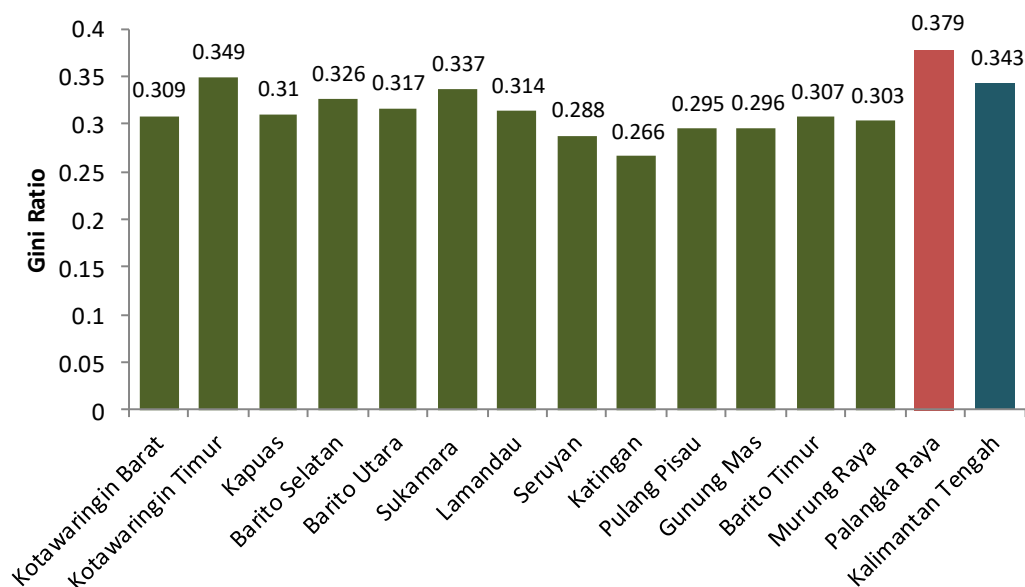
Sumber: BPS Kota Palangka Raya



Jika dilihat perkembangannya selama kurun waktu empat tahun terakhir, tahun 2017 menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi yaitu sebesar 0,049. Ini menunjukkan terjadinya peningkatan ketimpangan di tahun 2017 yang mengindikasikan bahwa meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan pemerataan pendapatan di Kota Palangka Raya. Secara umum dalam empat tahun terakhir, nilai Rasio Gini di Kota Palangka Raya masuk dalam kategori sedang.

**Gambar 3.2**

**Rasio Gini Menurut Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2017**



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Tengah

Walaupun nilai Rasio Gini pada 2017 di Kota Palangka Raya masih berada di kategori sedang, tetapi nilainya paling tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah dan juga lebih tinggi dibandingkan nilai Rasio Gini di Provinsi Kalimantan Tengah. Ini menunjukkan bahwa kondisi ketimpangan di Kota Palangka Raya cukup tinggi di Kalimantan Tengah.

Peningkatan ketimpangan diikuti dengan penurunan persentase penduduk miskin di Kota Palangka Raya yang turun sebesar 0,29 persen menjadi 5,37 persen di Tahun 2017. Walaupun persentase penduduk miskin turun, nilai indeks kedalaman kemiskinan (P1) dan keparahan kemiskinan (P2) justru meningkat menjadi 0,51 dan 0,14 di tahun 2017. Kenaikan angka kedalaman kemiskinan menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat yang memiliki pendapatan terendah atau miskin justru semakin menjauh di bawah garis kemiskinan. Golongan ini memiliki kemampuan daya beli sangat rendah sehingga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Adanya peningkatan keparahan kemiskinan juga menunjukkan kesenjangan yang semakin tinggi di antara masyarakat miskin di Kota Palangka Raya. Artinya, distribusi pengeluaran dan kemampuan daya beli masyarakat miskin semakin tidak merata yang menunjukkan makin senjangnya distribusi pendapatan di Kota Palangka Raya dimana masyarakat dengan golongan pendapatan tertinggi justru menikmati hasil pembangunan di Kota Palangka Raya lebih banyak dibandingkan golongan pendapatan rendah dan menengah.

Sementara dari sisi pertumbuhan ekonomi tidak ada peningkatan pertumbuhan di sektor pertanian dan industri di Kota Palangka Raya karena pertumbuhan ekonomi di Palangka Raya didominasi oleh sektor jasa. Padahal sektor pertanian banyak didominasi oleh penduduk dengan kelompok pendapatan rendah.

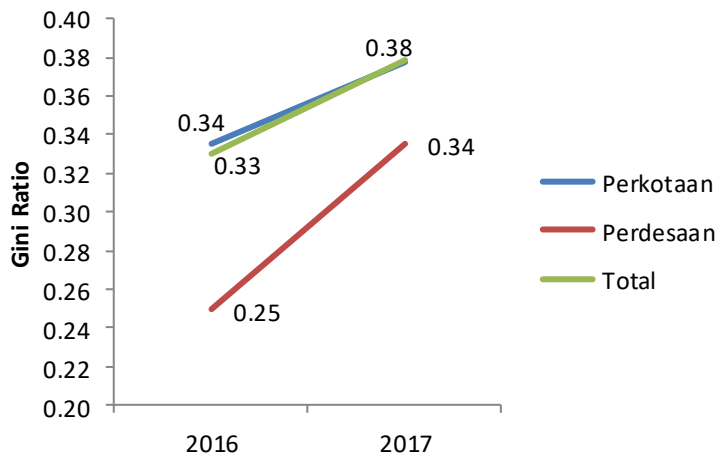
## **1.2. Rasio Gini Menurut Daerah Perkotaan dan Perdesaan**

Kota Palangka Raya walaupun termasuk dalam wilayah administrasi kota namun tidak semua daerahnya termasuk dalam kategori perkotaan. Dari segi ketersediaan fasilitas umum dan akses wilayah, masih ada beberapa daerah di Kota Palangka Raya yang termasuk dalam kategori perdesaan. Tingkat ketimpangan pendapatan antara daerah perkotaan dan perdesaan pun berada di kategori sedang. Di daerah perkotaan pembagian pendapatan cenderung lebih timpang dibandingkan daerah perdesaan. Hal

ini terlihat dari Rasio Gini daerah perkotaan sebesar 0,38 sedangkan nilai Rasio Gini di daerah perdesaan hanya sebesar 0,34.

**Gambar 3.3**

**Kecenderungan Rasio Gini Menurut Wilayah di Kota Palangka Raya, 2016-2017**



Sumber: BPS Kota Palangka Raya

Dalam dua tahun terakhir, daerah perkotaan selalu lebih timpang dibandingkan di daerah perdesaan di Kota Palangka Raya. Hal ini disebabkan antara lain karena lebih beragamnya jenis pekerjaan di daerah perkotaan sehingga tingkat pendapatan juga lebih beragam. Sementara di perdesaan, sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian.

Walaupun daerah perkotaan lebih timpang dibanding perdesaan, nilai Rasio Gini di perdesaan justru mengalami peningkatan lebih tinggi dibanding di perkotaan. Padahal di tahun 2016, tingkat ketimpangan di perdesaan masih berada di kategori rendah dibawah 0,3. Hal ini patut menjadi perhatian karena mencerminkan naiknya kesenjangan di daerah perdesaan. Selain itu ketimpangan di perdesaan patut diperhatikan, mengingat masalah kemiskinan yang biasanya terkonsentrasi di daerah

perdesaan. Mengatasi masalah ketimpangan di perdesaan akan menjadi kunci penting dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan di perdesaan.

Naiknya ketimpangan di perdesaan, mencerminkan belum mampunya berbagai intervensi pemerintah seperti pemberian bantuan dan subsidi yang difokuskan ke perdesaan untuk menurunkan ketimpangan di perdesaan. Penyebabnya antara lain adalah intervensi yang tidak tepat sasaran sehingga memperbesar *gap* di perdesaan. Selain itu, kurangnya pengelolaan kelembagaan ekonomi di perdesaan yang responsif khususnya terhadap kelompok miskin dan rentan juga menjadi salah satu penyebab naiknya kesenjangan di wilayah perdesaan.

### **1.3. Rasio Gini Menurut Lapangan Usaha**

Tingkat ketimpangan pendapatan pada masing-masing lapangan usaha menurut kriteria Oshima bervariasi antar lapangan usaha. Dari 10 lapangan usaha, sektor Pertambangan dan Penggalian memiliki nilai GR tertinggi yaitu 0,52 dan termasuk di kategori ketimpangan tinggi. Sementara sektor Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis memiliki nilai GR paling kecil yaitu 0,10.

Tingginya nilai GR di sektor primer yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (0,40) serta sektor Pertambangan dan Penggalian (0,52) menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di sektor primer di Kota Palangka Raya masih tinggi serta masih tidak meratanya rata-rata pengeluaran penduduk yang bekerja di sektor tersebut. Salah satu penyebabnya yaitu penguasaan lahan pertanian dan pertambangan yang masih didominasi oleh kelompok pelaku usaha tertentu saja. Hal ini membuat distribusi pendapatan buruh petani dan tambang timpang jika dibandingkan dengan pengusaha di sektor primer tersebut. Selain sektor primer, sektor Real Estat dan Aktivitas Jasa Lainnya menunjukkan nilai GR yang tinggi untuk Kota Palangka Raya walaupun masih berada di kategori ketimpangan sedang.

#### **1.4. Rasio Gini Menurut Status Pekerjaan Utama**

Ditinjau dari status pekerjaan utama, nilai Rasio Gini tertinggi ada pada kelompok pekerja keluarga tidak dibayar yaitu sebesar 0,48 dengan kategori ketimpangan sedang. Pekerja keluarga tidak dibayar pada umumnya terkonsentrasi di área yang memiliki keterampilan rendah, sektor yang kurang produktif dan informal, serta berupah rendah seperti sektor pertanian, industri pengolahan, serta perdagangan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angka Rasio Gini pada kelompok pekerja keluarga tidak dibayar juga mengalami peningkatan terbesar dibandingkan status pekerjaan lainnya.

#### **1.5. Rasio Gini Menurut Tingkat Pendidikan**

Pembagian pendapatan menurut angka Rasio Gini untuk penduduk 10 tahun ke atas dengan latar belakang pendidikan yang berbeda cenderung sama. Nilai Rasio Gini ini tergolong pada kategori sedang menurut Oshima untuk seluruh latar belakang pendidikan.

Bila ditinjau menurut besar kecilnya Rasio Gini maka golongan pendidikan dengan Rasio Gini yang paling rendah adalah D4/S1/S2/S3 (0,33). Rendahnya Rasio Gini pada latar belakang pendidikan ini menunjukkan upah yang diterima relatif merata. Sedangkan Rasio Gini terbesar adalah penduduk 10 tahun ke atas dengan latar belakang pendidikan D1/D2/D3 (0,40) walaupun masih dalam kelompok sedang.

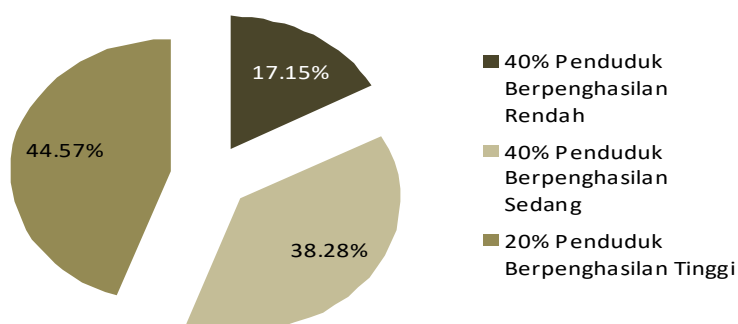
### **2. Distribusi Pendapatan Penduduk**

Selain dari nilai Rasio Gini, tingkat pemerataan pendapatan penduduk dapat juga ditentukan berdasarkan kriteria Bank Dunia. Pada tahun 2017 menurut total penduduk, kelompok 40 persen penduduk berpenghasilan rendah (masyarakat lapis bawah) menyerap sebanyak 17,15 persen dari total pendapatan, kelompok 40 persen penduduk berpenghasilan menengah mendapat 38,38 persen dan kelompok 20 persen penduduk berpenghasilan tinggi mendapat 44,57 persen. Berdasarkan kriteria Bank Dunia, dapat dikatakan bahwa distribusi pendapatan di Kota Palangka Raya tahun 2017

masih tergolong merata, dimana penduduk kelompok berpenghasilan rendah menerima lebih dari 17 persen dari pendapatan total di Kota Palangka Raya.

**Gambar 3.4**

**Distribusi Pendapatan Kota Palangka Raya  
Menurut Kriteria Bank Dunia, 2017**



Sumber: BPS Kota Palangka Raya

Walaupun secara kategori Kota Palangka Raya masih tergolong merata, kesenjangan pendapatan antar penduduk kian mencemaskan. Distribusi pendapatan menunjukkan porsi pendapatan 40 persen masyarakat dengan pendapatan terendah menurun, dari 18,26 persen (2016) menjadi 17,15 persen (2017). Pada saat yang sama, porsi pendapatan untuk kelompok 40 persen berpendapatan menengah juga mengalami penurunan dari 42,31 persen menjadi 38,28 persen. Peningkatan cukup tinggi terjadi pada kelompok 20 persen masyarakat berpendapatan tertinggi yang meningkat 5,14 persen dari 39,43 persen (2016) menjadi 44,57 persen di tahun 2017.

Adanya peningkatan porsi pendapatan di kelompok tertinggi merupakan salah satu penyebab makin senjangnya distribusi pendapatan di Kota Palangka Raya dikarenakan kelompok terkaya makin banyak menikmati hasil pembangunan. Laju pertumbuhan ekonomi yang meningkat di tahun 2017 menjadi kontradiktif dengan makin senjangnya distribusi pendapatan penduduk di Kota Palangka Raya dikarenakan

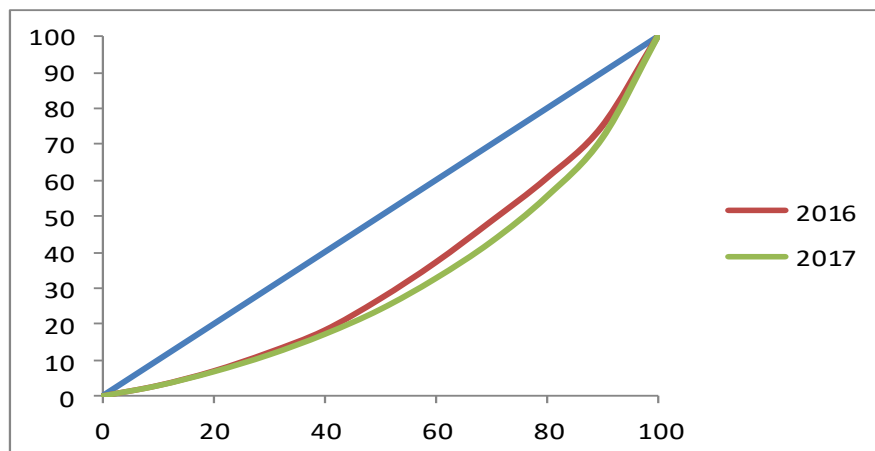
laju pendapatan penduduk miskin yang tidak bisa mengejar kecepatan tumbuhnya pendapatan penduduk golongan kaya.

### 3. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz distribusi pendapatan penduduk di Kota Palangka Raya pada tahun 2017 bergeser jika dibandingkan dengan tahun 2016. Berdasarkan Gambar 3.5, distribusi pendapatan penduduk di tahun 2017 lebih tidak merata dibandingkan tahun 2016. Ini mengindikasikan bahwa di tahun 2017, Kota Palangka Raya semakin timpang sejalan dengan nilai GR di Kota Palangka Raya yang juga semakin tinggi. Naiknya ketimpangan di Kota Palangka Raya menunjukkan perlunya menciptakan kebijakan pemerataan pendapatan yang tepat sasaran, efektif, dan efisien agar ketimpangan tidak semakin meningkat.

**Gambar 3.5**

**Kurva Lorenz Kota Palangka Raya, 2016-2017**



Sumber: BPS Kota Palangka Raya

## IV. PENUTUP

Salah satu indikator dari keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut harus dibarengi dengan pemerataan pendapatan masyarakat, sehingga hasil-hasil pembangunan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat agar tidak berdampak pada kesenjangan sosial.

Berdasarkan nilai Rasio Gini, ketimpangan di Kota Palangka Raya berada pada kategori sedang. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, distribusi pendapatan di Kota Palangka Raya semakin timpang. Daerah perkotaan masih memiliki ketimpangan yang lebih tinggi dibanding di perdesaan tetapi daerah perdesaan juga semakin timpang yang ditunjukkan dengan peningkatan Rasio Gini dimana peningkatannya lebih besar dibanding peningkatan Rasio Gini di perkotaan.

Hasil Rasio Gini ini juga semakin terlihat ditinjau dari distribusi pendapatan penduduk di Kota Palangka Raya di tahun 2017. Porsi pendapatan penduduk golongan 40% pendapatan terendah di Kota Palangka Raya semakin menurun menjadi 17,15 persen. Hal ini juga terjadi pada kelompok kelas menengah dimana porsi pendapatan juga makin turun di 2017. Peningkatan porsi pendapatan terjadi pada kelompok 20 persen pendapatan tertinggi yang naik cukup tinggi. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi di Kota Palangka Raya menunjukkan kecenderungan membaik tetapi ternyata hasilnya tidak mampu dinikmati oleh penduduk di kelompok pendapatan terendah.

Terkait meningkatnya ketimpangan di Kota Palangka Raya di tahun 2017 terutama untuk penduduk miskin dan juga penduduk yang tinggal di perdesaan, perlu dikaji kembali efektifitas dan ketepatan sasaran dari berbagai kebijakan bantuan dan subsidi yang diberikan untuk kedua kelompok ini. Pentingnya menurunkan



ketimpangan dikarenakan tingginya ketimpangan pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi serta menimbulkan konflik sosial karena tidak meratanya pembangunan di suatu wilayah. Pemerintah Kota Palangka Raya diharapkan dapat memberikan perhatian khusus dalam upaya mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan. Selain itu, kontribusi dan peran aktif para pelaku bisnis dan masyarakat juga diperlukan untuk mengatasi masalah ketimpangan di Kota Palangka Raya agar kaum miskin tidak semakin terpinggirkan.

## LAMPIRAN

**Tabel 1. Rasio Gini Kota Palangka Raya , 2015-2017**

No.	Tahun	Gini Ratio
(1)	(2)	(3)
1	2015	0,338
2	2016	0,330
3	2017	0,379

**Tabel 2. Distribusi Pendapatan Kota Palangka Raya Menurut Kriteria Bank Dunia, 2015-2017**

No.	Kelompok penduduk	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	40 % Kelompok penduduk penghasilan rendah	20,19	18,26	17,15
2	40 % Kelompok penduduk penghasilan menengah	37,87	42,31	38,28
3	20 % Kelompok penduduk penghasilan tinggi	41,94	39,43	44,57

**Tabel 3. Rasio Gini Kota Palangka Raya Menurut Tipe Daerah, 2017**

No.	Tipe daerah	Gini Ratio
(1)	(2)	(3)
1	Kota	0,378
2	Desa	0,335
3	Kota+Desa	0,379

**Tabel 4. Rasio Gini Penduduk 10 tahun Ke atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha, Kota Palangka Raya 2017**

No.	Lapangan Usaha	Rasio Gini
(1)	(2)	(3)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,403
2	Pertambangan dan Penggalian	0,522
3	Industri Pengolahan	0,318
4	Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	0,375
5	Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Remediasi	0,185
6	Konstruksi	0,354
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor	0,379
8	Pengangkutan dan Pergudangan	0,328
9	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	0,275
10	Informasi dan Komunikasi	0,225
11	Aktivitas Keuangan dan Asuransi	0,306
12	Real Estat	0,463
13	Aktivitas Profesional, Ilmiah, dan Teknis	0,102
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0,332
15	Pendidikan	0,342
16	Aktivitas Kesehatan Manusia dan Aktivitas Sosial	0,246
17	Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi	0,137
18	Aktivitas Jasa Lainnya	0,432

**Tabel 5. Rasio Gini 10 tahun Keatas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Kota Palangka Raya 2017**

No.	Status Pekerjaan	Rasio Gini
(1)	(2)	(3)
1	Berusaha sendiri	0,343
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	0,428
3	Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	0,335
4	Buruh/karyawan/pegawai	0,372
5	Pekerja bebas	0,328
6	Pekerja keluarga/tidak dibayar	0,480

**Tabel 6. Rasio Gini Penduduk 10 tahun Keatas Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan, Kota Palangka Raya, 2017**

No.	Tingkat Pendidikan	Rasio Gini
(1)	(2)	(3)
1	SD ke bawah	0,389
2	SMP sederajat	0,393
3	SMA sederajat	0,334
4	D1/D2/D3	0,400
5	D4/S1/S2/S3	0,330

